

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Gerakan Nagari Madani pertama kali diluncurkan pada bulan September tahun 2017 oleh Bupati Agam H. Indra Catri, di halaman kantor Bupati Kabupaten Agam. Gerakan Nagari Madani merupakan program yang berusaha untuk mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK)*. Program ini dilandasi oleh peraturan Bupati Agam Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nagari Madani. Berdasarkan peraturan tersebut dinyatakan bahwa program ini wajib dilaksanakan oleh setiap Nagari di Kabupaten Agam guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang beragama dan beradat (Madani).

Munculnya Program Gerakan Nagari Madani dilatarbelakangi oleh pudarnya prinsip ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat Agam. Arus negatif globalisasi dan pengaruh budaya luar diduga telah mempengaruhi pola perilaku serta kehidupan masyarakat yang berdampak pada pudarnya prinsip ABS-SBK bagi masyarakat Agam. Terdapat 6 indikator muatan dalam Gerakan Nagari Madani sesuai dengan peraturan Bupati Agam tentang pelaksanaannya yaitu, optimalisasi pendidikan informal terutama Al-Qur'an, peningkatan peranan mesjid/surau sebagai sentra kehidupan sosial masyarakat, pelaksanaan perlindungan atas kampung dan masyarakat nagari, peningkatan rasa kepedulian sosial, *ukhuwah islamiyah*, kekeluargaan dan gotong royong, penerapan adat, seni

budaya dan olahraga yang sesuai dengan filosofi *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*, serta peningkatan kesalehan individu dan sosial.

Peran humas pada pemerintah daerah Kabupaten Agam dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Agam. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam sendiri mulai dibentuk pada tahun 2021. Sebelumnya fungsi-fungsi yang kini berada di bawah Diskominfo Agam dijalankan oleh bagian humas yang berada di bawah Sekretariat Daerah Kabupaten Agam. Dengan adanya perubahan ini, maka pengelolaan dan pengembangan sektor komunikasi dan informasi di Kabupaten Agam kini dipusatkan pada Diskominfo. Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika BAB II pasal 4 bahwa Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan informasi dan komunikasi publik, termasuk kehumasan Pemerintah Daerah. Sehingga Diskominfo sesuai dengan peraturan tersebut memiliki fungsi sebagai humas dalam pemerintahan daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut Diskominfo sebagai Humas Pemerintah Kabupaten Agam memainkan peran penting dalam mensosialisasikan program Gerakan Nagari Madani kepada masyarakat agar dapat berjalan secara optimal. Sosialisasi kepada masyarakat dibutuhkan untuk menghasilkan partisipasi sosial bagi masyarakat terhadap program tersebut. Melalui proses sosialisasi, masyarakat mampu belajar dan bertindak sesuai nilai-nilai yang mereka anut. Sehingga

program Gerakan Nagari Madani dapat diterima dan berjalan secara merata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Agam.

Mengingat kuatnya landasan yang mewajibkan Program Gerakan Nagari Madani di Kabupaten Agam, serta adanya Agam Madani yang tercantum dalam visi dan misi Kabupaten Agam jelas bahwa program ini harus berjalan secara merata untuk mencapai tujuan Agam yang Madani. Namun setelah dilakukan observasi pada masyarakat banyak ditemukan masyarakat yang tidak memahami bahkan tidak mengenal Gerakan Nagari Madani itu sendiri. Meskipun wajib namun masih terdapat beberapa nagari yang belum begitu menerapkan gerakan nagari madani, sehingga pelaksanaannya pun menjadi tidak merata. Tidak hanya wajib, dengan terteranya “madani” dalam visi misi Kabupaten Agam serta visi misi setiap kepala daerah yang menjabat setiap tahunnya menjadikan program ini perlu untuk disosialisasikan setiap tahunnya.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari terdapat 5 level penilaian untuk setiap nagari dalam pelaksanaan program. Menurut data terbaru tahun 2023, dari 92 nagari yang ada di Kabupaten Agam hanya 10 nagari yang sudah memenuhi penilaian untuk dikategorikan ke dalam level 5 dan masih terdapat beberapa nagari yang masih menempati posisi level 1 dan 2. Penilaian ini dilakukan oleh tim penilai yang dibentuk oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari berdasarkan beberapa indikator pelaksanaan gerakan nagari madani sesuai dengan pedoman pelaksanaan. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan

program di setiap nagari belum merata. Sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa program ini masih belum terlaksana secara merata di Kabupaten Agam.

Persoalan ini menjadi penting karena tidak meratanya program ini dapat menghambat tercapainya tujuan Agam yang madani sebagai bagian dari visi dan misi Kabupaten Agam. Tertulis dalam visi Kabupaten Agam yang dimuat dalam website resmi pemerintah Kabupaten Agam yaitu mewujudkan Kabupaten Agam maju, masyarakat sejahtera, menuju Agam mandiri, berprestasi yang madani. Kemudian pada poin ke-lima dari misi Kabupaten Agam yaitu meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang madani, berlandaskan *ABS-SBK*. Sehingga tidak meratanya program ini dapat berdampak pada terhambatnya pencapaian pembangunan daerah secara menyeluruh. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mensosialisasikan program ini, peran Dinas Kominfo Kabupaten Agam perlu diteliti untuk mengetahui sejauh mana upaya sosialisasi telah dilakukan, dan bagaimana memperbaiki situasi tersebut. Dalam konteks tersebut, penelitian ini akan berfokus pada peran Dinas Kominfo Kabupaten Agam dalam mensosialisasikan program Gerakan Nagari Madani.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan solusi bagi Dinas Kominfo Kabupaten Agam mengenai strategi yang efektif dalam mensosialisasikan Program Gerakan Nagari Madani. Melalui penelitian ini diharapkan dapat membantu Dinas Kominfo Kabupaten Agam sebagai humas pemerintah untuk memperkuat peran dan kontribusinya dalam menjalankan Program Gerakan Nagari Madani. Sehingga dapat menjadi solusi atas

permasalahan tidak meratanya pelaksanaan program ini agar dapat terlaksana dengan lebih merata dan dikenal oleh seluruh masyarakat Kabupaten Agam.

Penelitian mengenai peran humas ataupun Dinas Kominfo pada umumnya membahas mengenai perannya terhadap suatu kebijakan ataupun program. Namun penelitian yang secara khusus mengkaji peran Dinas Kominfo Kabupaten Agam dalam mensosialisasikan Program Gerakan Nagari Madani di wilayah Kabupaten Agam masih sangat terbatas atau bahkan belum ada. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti menilai penelitian ini penting karena memiliki kebaruan yang signifikan dalam mengisi kekosongan pengetahuan dan memberikan wawasan baru tentang bagaimana Dinas Kominfo Kabupaten Agam berperan menjalankan tugasnya dalam mensosialisasikan program yang bertujuan untuk membangun masyarakat menjadi madani.

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk melihat lebih dalam mengenai bagaimana Dinas Kominfo Kabupaten Agam melakukan kegiatan kehumasan dalam mensosialisasikan Program Gerakan Nagari Madani. Maka, disusunlah judul **“Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam dalam Mensosialisasikan Program Gerakan Nagari Madani di Kabupaten Agam”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam latar belakang maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana peran Dinas Kominfo Kabupaten Agam dalam mensosialisasikan Program Gerakan Nagari Madani di Kabupaten Agam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan pokok di atas, peneliti mengangkat tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi peran Dinas Kominfo Kabupaten Agam dalam mensosialisasikan Program Gerakan Nagari Madani.
2. Menganalisis kendala Dinas Kominfo Kabupaten Agam dalam mensosialisasikan Program Gerakan Nagari Madani.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dan kontribusi bagi Ilmu Komunikasi terkait pembahasan Humas Pemerintah serta menjadi referensi penelitian yang relevan dengan kajian pada penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas Kominfo Kabupaten Agam dalam mengoptimalkan pelaksanaan Program Gerakan Nagari Madani.

